

Simposium Perikanan dan Kelautan sebagai Instrumen Kolaborasi Multipihak dalam Pembangunan Agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan

Tamrin Tamrin¹, Riyadi Subur²

¹)Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun, Indonesia

²)Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun, Indonesia

Article Info

Article history

Received : Apr 20, 2026
Revised : May 04, 2026
Accepted : May 20, 2026

Kata Kunci:

Agromaritim;
Halmahera Selatan;
Hilirisasi;
Kolaborasi;
Simposium.

Abstrak

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi agromaritim yang besar, namun pembangunan wilayah masih menghadapi permasalahan berupa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya integrasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, kolaborasi, dan sinergi multipihak dalam mendukung pembangunan agromaritim berkelanjutan melalui penyelenggaraan Simposium Perikanan dan Kelautan. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis forum ilmiah yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, pemuda, dan masyarakat pesisir. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan diskusi interaktif. Indikator keberhasilan kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi strategis pembangunan agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya partisipasi dan interaksi peserta serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya pembangunan agromaritim berbasis kolaborasi. Simposium menghasilkan tiga rekomendasi strategis, yaitu pembentukan Gugus Tugas Agromaritim, penyusunan peta jalan hilirisasi berbasis komoditas unggulan, dan pengusulan Halmahera Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Agromaritim. Kegiatan ini memperkuat pendekatan collaborative governance dalam pembangunan wilayah kepulauan serta mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Abstract

South Halmahera Regency has significant agromaritime potential; however, regional development still faces several challenges, including weak stakeholder coordination, low cross-sectoral integration, and the suboptimal utilization of research and innovation. This activity aimed to strengthen understanding, collaboration, and multi-stakeholder synergy in supporting sustainable agromaritime development through the implementation of the Fisheries and Marine Symposium. The activity applied a participatory approach based on a scientific forum involving local government, academics, business actors, youth, and coastal communities. Data were collected through observation, documentation, and interactive discussions. The main indicator of success was the formulation of strategic recommendations for agromaritime development in South Halmahera Regency. The results showed high participant engagement and interaction, as well as increased understanding of the importance of collaborative-based agromaritime development. The symposium produced three strategic recommendations: the establishment of an Agromaritime Task Force, the development of a downstream roadmap based on leading commodities, and the proposal of South Halmahera as a Special Economic Zone (SEZ) for agromaritime development. This activity strengthened the collaborative governance approach in archipelagic regional development and encouraged stronger communication and coordination among regional development stakeholders.

Corresponding Author:

Tamrin Tamrin,
Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Khairun
Jalan Pertamina, Kampus II Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, 97716



PENDAHULUAN

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu wilayah kepulauan strategis di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor agromaritim. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh perairan dengan luas laut mencapai 31.484,40 km² (78%) dibandingkan daratan seluas 8.779,32 km² (22%) (BPS Halmahera Selatan, 2025). Kondisi ini diperkuat dengan karakteristik sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas 463 pulau (Kementerian Dalam Negeri, 2025), serta sekitar 70% penduduknya bermukim di kawasan pesisir (Nusantara et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya kelautan dan pesisir sangat tinggi.

Potensi sumber daya perikanan di wilayah ini sangat melimpah karena termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715. Komoditas unggulan meliputi ikan pelagis seperti tuna dan cakalang (Mukhaiyar et al., 2022; Nugrah et al., 2025), serta ikan demersal seperti kerapu, kakap, dan baronang (Ririhena et al., 2023). Selain itu, potensi perikanan budidaya juga cukup besar, mencakup budidaya ikan, rumput laut, dan kekerangan dengan luas kawasan mencapai 18.962,6 hektare (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, 2014; Radiarta et al., 2010).

Tidak hanya itu, kekayaan ekosistem pesisir dan laut juga menjadi modal penting dalam pembangunan agromaritim. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki ekosistem terumbu karang seluas 16.338,3 ribu hektare, padang lamun seluas 8.283,2 hektare, serta mangrove seluas 17.843,7 ribu hektare yang merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Maluku Utara (Ririhena et al., 2023). Sebagian wilayah tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, seperti Kepulauan Widi, Kepulauan Guraici, serta kawasan perairan Pulau Makian dan Pulau Moti melalui kebijakan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020a, 2020b, 2020c).

Sektor pertanian dan perkebunan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, kangkung, dan bawang telah berhasil dikembangkan, begitu pula tanaman buah seperti pisang, mangga, dan jeruk (BPS Halmahera Selatan, 2025; Nasar et al., 2024). Selain itu, komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, pala, cengkeh, dan kelapa sawit menjadi penopang ekonomi masyarakat (BPS Halmahera Selatan, 2025; Tamrin & Kamaluddin, 2022; Wance et al., 2021). Potensi ini semakin memperkuat integrasi sektor agro dan maritim dalam kerangka pembangunan agromaritim.

Dukungan infrastruktur juga mulai berkembang, ditandai dengan keberadaan pelabuhan perikanan (Hadji et al., 2021). Seperti Pelabuhan Perikanan Panambuang dan Pelabuhan Perikanan Sayoang yang dilengkapi dengan fasilitas pabrik es, cold storage, dan air blast freezer (ABF). Jaringan pelabuhan lainnya, baik pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan penyeberangan (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, 2014), turut mendukung konektivitas antar wilayah. Keberadaan kawasan industri di Pulau Obi yang termasuk dalam rencana pembangunan nasional (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2025), juga memperkuat rantai nilai sektor agromaritim dalam skala yang lebih luas.

Potensi pariwisata bahari menjadi sektor tambahan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Halmahera Selatan. Luas kawasan wisata bahari mencapai 3.131,38 hektare (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, 2014) Kepulauan Widi dan Kepulauan Guraici beberapa diantaranya yang menjadi destinasi unggulan (Nur et al., 2025). Hal ini membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis jasa yang terintegrasi dengan sektor perikanan dan pertanian.

Namun, besarnya potensi sumber daya tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pembangunan agromaritim yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Selatan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya integrasi kebijakan lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kelemahan tata kelola (*governance failure*) yang terlihat dari pelaksanaan program pembangunan yang masih bersifat sektoral, terbatasnya kolaborasi antar institusi, serta belum tersedianya ruang ilmiah yang mampu mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai

program pembangunan sebelumnya juga belum menunjukkan dampak optimal terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pengembangan sistem agromaritim daerah.

Penyelenggaraan Simposium Perikanan dan Kelautan menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat komunikasi, pertukaran pengetahuan, dan sinergi multipihak dalam pembangunan agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan. Simposium ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai media penyusunan rekomendasi strategis berbasis kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Kebaruan kegiatan ini terletak pada pemanfaatan simposium sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan agromaritim berbasis partisipasi dan jejaring kelembagaan di wilayah kepulauan. Kajian terhadap kegiatan ini penting dilakukan karena efektivitas forum ilmiah dalam mendorong transformasi pemahaman dan kolaborasi pembangunan daerah masih jarang dianalisis secara akademik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis forum ilmiah melalui penyelenggaraan Simposium Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2025 di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan. Tahap persiapan meliputi penyusunan desain kegiatan, penentuan tema, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, penetapan narasumber, serta penyusunan instrumen evaluasi kegiatan. Peserta kegiatan terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha perikanan dan pertanian, organisasi kepemudaan, serta masyarakat pesisir yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap pembangunan agromaritim daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi, dan pencatatan hasil diskusi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Seluruh proses diskusi didokumentasikan dan dicatat sebagai bahan analisis. Rekomendasi strategis disusun berdasarkan hasil pemaparan narasumber, tanggapan peserta, dan identifikasi isu prioritas yang muncul selama diskusi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan indikator keberhasilan kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi strategis pembangunan agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan simposium menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, akademisi, pelaku usaha, hingga nelayan dan petani pesisir. Partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi mencerminkan tingginya kebutuhan akan ruang dialog yang inklusif dalam merumuskan arah pembangunan agromaritim. Interaksi yang terbangun tidak hanya bersifat satu arah melalui penyampaian materi, tetapi berkembang menjadi pertukaran gagasan yang konstruktif antar pemangku kepentingan (**Gambar 1**). Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa keterlibatan multipihak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat keberlanjutan program pembangunan (Han et al., 2024; Maccioni et al., 2024; Nonet et al., 2022). Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa forum ilmiah seperti simposium dapat berfungsi sebagai media integratif dalam menyatukan perspektif kebijakan, akademik, dan praktik lapangan.

Berdasarkan hasil diskusi dan pertukaran gagasan selama simposium, dirumuskan tiga rekomendasi strategis yang dinilai relevan dan aplikatif dalam mendukung pembangunan agromaritim Halmahera Selatan (**Gambar 2**). Rekomendasi pertama adalah pembentukan Gugus Tugas Agromaritim Halmahera Selatan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat pesisir. Model ini telah berhasil diterapkan pada berbagai sektor, seperti Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia (*Task Force 115*) yang mampu memberantas pencurian ikan dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut (Suherman et al., 2020). Contoh lain adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berhasil menyelesaikan konflik agraria di beberapa wilayah (Darman, 2026). Pendekatan serupa berpotensi membentuk mekanisme koordinasi lintas aktor yang lebih terstruktur di Halmahera Selatan, sehingga tumpang tindih program dapat ditekan dan efektivitas implementasi kebijakan meningkat.

Rekomendasi kedua adalah penyusunan peta jalan hilirisasi agromaritim Halmahera Selatan



Gambar 2. Rekomendasi strategis pembangunan agromaritim Halmahera Selatan

KESIMPULAN

Pelaksanaan Simposium Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa forum ilmiah berbasis kolaborasi multipihak mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan agromaritim daerah. Hasil kegiatan menjawab permasalahan utama terkait lemahnya koordinasi dan tata kelola pembangunan agromaritim melalui penyusunan tiga rekomendasi strategis, yaitu pembentukan Gugus Tugas Agromaritim, penyusunan peta jalan hilirisasi berbasis komoditas unggulan, serta pengusulan Halmahera Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Agromaritim.

Kontribusi teoritis kegiatan ini memperkuat konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses pembangunan daerah. Kontribusi praktis terlihat dari tersusunnya rekomendasi pembangunan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan pembangunan agromaritim. Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena evaluasi dampak jangka panjang terhadap implementasi kebijakan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat belum dapat diukur secara komprehensif. Penelitian dan kegiatan lanjutan perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi rekomendasi, tingkat keberlanjutan kolaborasi antar aktor, serta dampaknya terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pembangunan wilayah kepulauan berbasis agromaritim.

Referensi

- Baek, E., So, A. R., & Wui, P. Y. (2026). Climate change and environmental drivers of Gim (*Pyropia yezoensis*) aquaculture: evidence from Wando, South Korea. *Aquaculture International*, 34(3), 106.
- BPS Halmahera Selatan. (2025). *Halmahera Selatan dalam Angka Tahun 2025*.
- Darman, R. (2026). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Terhadap Konflik Tanah Bekas Lapangan Terbang di Nagari Gadut Kabupaten Agam. *Tunas Agraria*, 9(1), 49–66.
- Hadji, F., Taeran, I., Ahmad, M. J., Djamhur, M., Iksan, K. H., & Karman, A. (2021). Evaluasi Pemanfaatan dan Kepuasan Fasilitas Rantai Dingin dan SPDN di PPP Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(1), 1–10.
- Han, Z., Wei, Y., Bouckaert, F., Johnston, K., & Head, B. (2024). Stakeholder engagement in natural resources

- management: Where go from here? *Journal of Cleaner Production*, 435, 140521.
- Kementerian Dalam Negeri. (2025). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau.*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020a). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 102/KEPMEN-KP/2020 tentang kawasan konservasi di perairan Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara.*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020b). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 103/KEPMEN-KP/2020 tentang kawasan konservasi di perairan Kepulauan Guraici di Provinsi Maluku Utara.*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020c). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 104/KEPMEN-KP/2020 tentang kawasan konservasi di perairan Pulau Makian dan Pulau Moti di Provinsi Maluku Utara.*
- Lubis, R. (2025). Digitalisasi dan Strategi Bisnis Elektronik dalam Pengembangan Hilirisasi Sawit Bernilai Tambah: Studi pada PTPN IV. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 8(2), 85–99.
- Maccioni, S., d'Angella, F., De Carlo, M., & Sfogliarini, B. (2024). Stakeholder Engagement and Triggers for Sustainable Development in Complex Fragile Ecosystems: Evidence from Alpine Trentino Region. In *Sustainability* (Vol. 16, Issue 22, p. 9879).
- Meutia, S., & Nasution, A. G. (2024). Analisa Kerusakan Pada Mesin Press Expeller Pada Stasiun Pengolahan Dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA) Di Perkebunan Nusantara III (PERSERO) PKO Sei Mangkei. *Industrial Engineering Journal*, 13(1), 1–9.
- Mukhaiyar, U., Sari, F. P., Suherlan, B. C., & Eldhyawati, S. Y. (2022). Pemetaan spasial hasil tangkapan tuna untuk mendorong program pemerintah tepat sasaran (studi kasus: Maluku Utara). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 111–123.
- Nasar, F., Kamal, M., Hadi, A., Khotib, M., & Amana, A. (2024). Peranan Subsektor Holtikultura, Kontribusi Pembagunan Wilayah Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 9(2), 12–21.
- Nonet, G. A.-H., Gössling, T., Van Tulder, R., & Bryson, J. M. (2022). Multi-stakeholder Engagement for the Sustainable Development Goals: Introduction to the Special Issue. *Journal of Business Ethics*, 180(4), 945–957.
- Nugrah, A., Kapita, S. N., & Khairan, A. (2025). Identifikasi citra ikan cakalang berdasarkan fitur bentuk dan tekstur menggunakan metode k-means clustering. *IJIS*, 10(2), 246–255.
- Nur, M., Sinay, S. B., & Rumkel, N. (2025). Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Bahari yang Berkeadilan bagi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Hukum Pelita*, 6(2), 790–808.
- Nusantara, S. D., Muhammad, F., Maryono, M., & Halim, M. A. R. (2023). Tantangan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*, 3(2), 216–225.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara. (2014). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara tahun 2014–2034.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029.*
- Radiarta, I. N., Sudradjat, A., & Kusnendar, E. (2010). Analisis spasial potensi kawasan budidaya laut di Provinsi Maluku Utara menggunakan aplikasi data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. *Jurnal Riset Akuakultur*, 5(1), 143–153.
- Ririhena, J. E., Bayau, E., Erbabley, B. Z., & Natan, Y. (2023). Analisis Potensi Sumberdaya Perikanan Tahun 2019–2022 di Pulau Halmahera. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5.
- Suherman, A., Santosa, M. A., Ihsan, Y. N., Wijayanto, D., & Juwana, S. (2020). The eradication of IUU fishing in Indonesia for fisheries resources sustainability by the Task Force 115. *AAFL Bioflux*, 13(5), 2522–2537.
- Tamrin, M., & Kamaluddin, A. K. (2022). Pengelolaan agroforestri pada blok pemberdayaan masyarakat KPH Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 17(2), 135–147.
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). PKM Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *Selaparang*, 3(2), 233–240.
- Zaenuddin, M. (2023). Strategi kebijakan pembangunan di Kota Batam. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 13–20.
- Zitri, I., Gushadi, A., Darmansyah, D., & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat: Implementasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3), 113–120.